



**BERHENTI
MENGAYOMI
KORUPSI**

HASIL PEMANTAUAN TREN PENINDAKAN KASUS KORUPSI TAHUN 2021

**Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW
April 2022**

www.antikorupsi.org



Latar Belakang

- Meski telah dilabeli sebagai *extra-ordinary crime*, upaya pemberantasan korupsi oleh pemerintah masih belum dilakukan secara serius
- Dalam aspek keterbukaan informasi, APH cenderung belum transparan dan akuntabel mengenai informasi dalam proses penyidikan. Di antara 3 Institusi Penegak Hukum, hanya KPK yang cenderung informatif dalam publikasi data penindakan korupsi di tahap penyidikan.
- Pengawasan dapat dilakukan sejak proses penyidikan setelah adanya penetapan tersangka



Total anggaran yang dialokasikan untuk penindakan kasus korupsi (penyelidikan/penyidikan) oleh APH

Rp382,8 miliar

Target penindakan kasus korupsi oleh APH pada 2021 berdasarkan DIPA TA 2021

2.217 kasus korupsi

Sumber: Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kepolisian, Kejaksaan, KPK Tahun 2021

Tujuan

1. Memberikan gambaran mengenai penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2021;
2. Membandingkan tren penindakan kasus korupsi pada tahun 2021 dengan 5 (lima) tahun sebelumnya;
3. Melakukan pemetaan terhadap pola korupsi yang terjadi selama Tahun 2021 sehingga pemerintah dapat mengambil upaya strategis untuk mencegah korupsi;
4. Mendorong transparansi data penindakan kasus korupsi di APH;
5. Menilai kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh APH selama Tahun 2021



Metode

- Tabulasi data;
 - Data informasi berasal dari media dan/atau situs resmi penegak hukum dan/atau mengirimkan surat permohonan informasi mengenai penanganan kasus korupsi ke APH;
 - Periode pemantauan: 1 Januari – 31 Desember 2021;
- Olah data;
- Penilaian Kinerja APH didasarkan pada DIPA TA 2021
- Data komparasi;
- Analisis deskriptif.



Keterbatasan Pemantauan

1. Sumber data yang diperoleh ICW, sebagian besar berasal dari sumber sekunder
2. Perbedaan terminologi terkait tipikor yang ditangani APH, ICW menggunakan istilah “kasus” sedangkan APH menggunakan istilah “perkara”



Temuan Umum

Kasus



533 Kasus

Tersangka



1.173 Tersangka

Potensi Kerugian Negara



Rp29,438 Triliun

Potensi Nilai Suap



Rp212,5 Miliar

Potensi Nilai Pungli



Rp5,97 Miliar

Potensi Nilai Pencucian
Uang



Rp20,97 Miliar



Temuan Umum

Dari 533 kasus:

- 484 kasus baru atau 90,8% ;
- 38 pengembangan kasus atau 7,1% ; dan
- 11 Operasi Tangkap Tangan (OTT) atau 2,1%



Penilaian Kinerja Penindakan Kasus Korupsi

$$\frac{\text{Penindakan kasus yang terpantau}}{\text{Target penindakan kasus}} \times 100\% = \% \text{ kasus yang ditangani}$$

No	% Kasus yang ditangani	Peringkat	Keterangan
1	81-100	A	Sangat baik
2	61-80	B	Baik
3	41-80	C	Cukup
4	21-40	D	Buruk
5	0-20	E	Sangat buruk

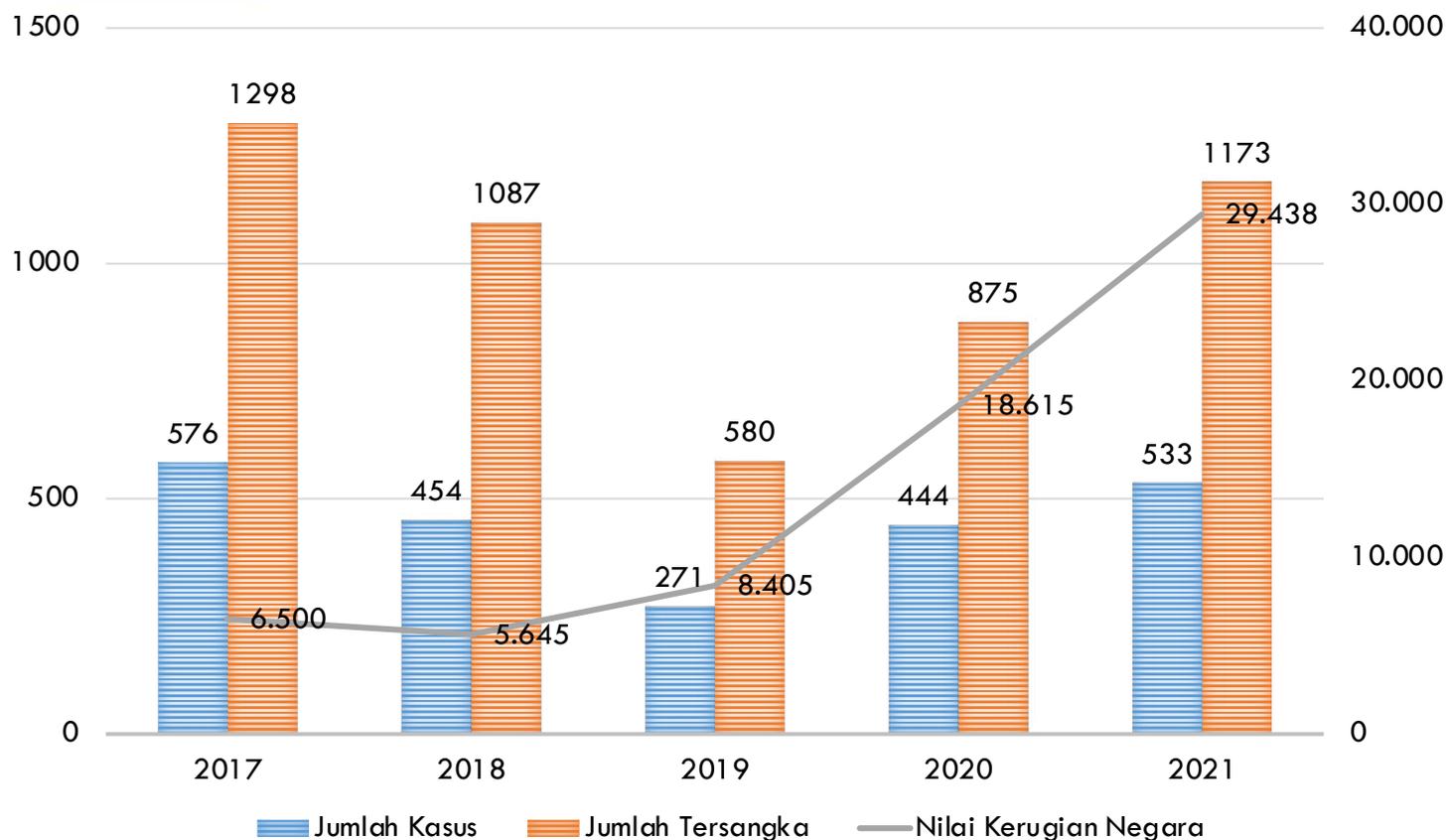
Persentase dihitung berdasarkan kasus korupsi yang terpantau oleh ICW dan dibandingkan dengan target penindakan kasus korupsi selama tahun 2021.



Kinerja penindakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Institusi Penegak Hukum sepanjang tahun 2021 hanya mencapai 24 persen dan mendapatkan nilai:

D

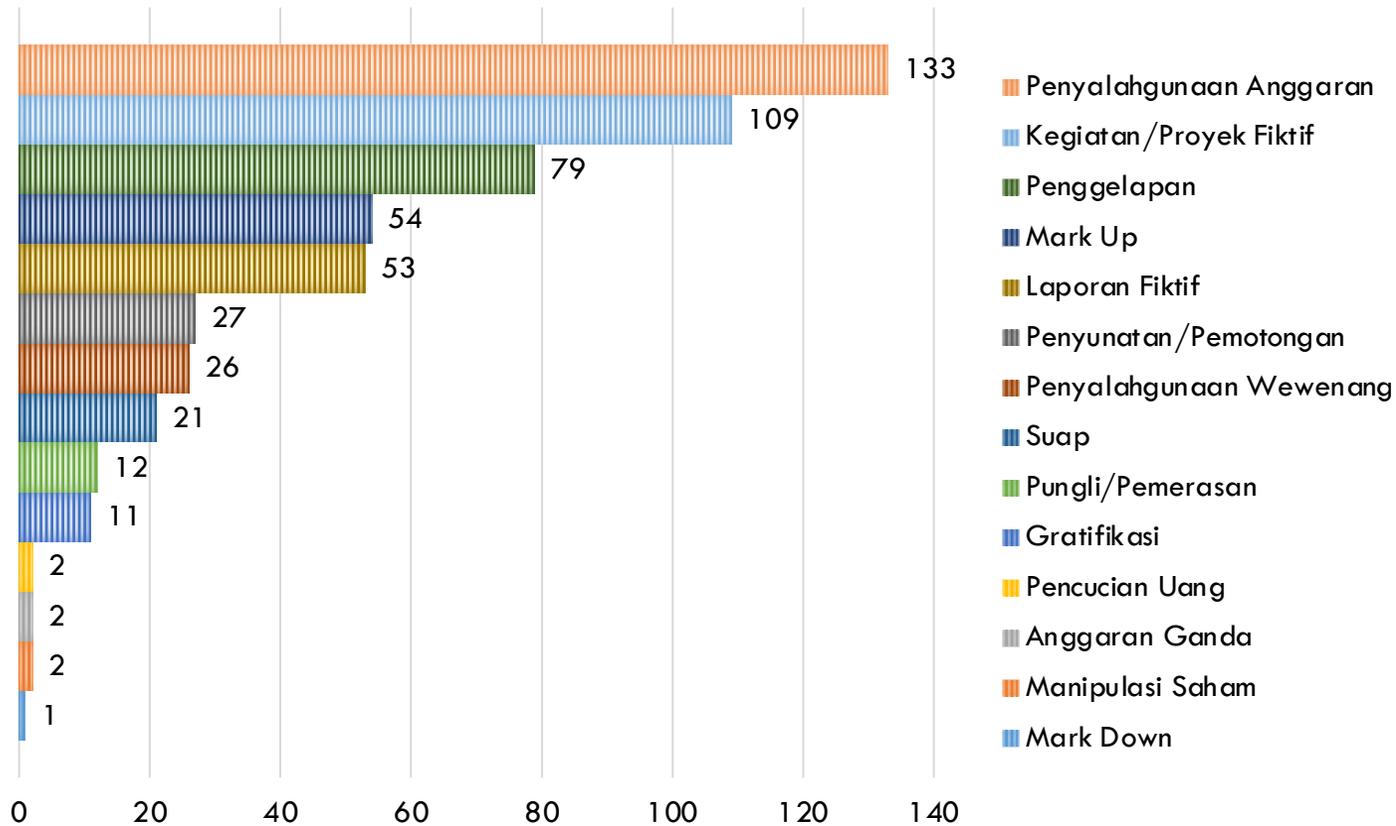
Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021



- Penindakan kasus korupsi oleh APH sejak tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif;
- Sedangkan potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat korupsi, trennya cenderung meningkat;
- Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah setiap tahun semakin buruk dari segi pengawasan.



Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Modus Tahun 2021



- Penyalahgunaan anggaran menjadi modus yang paling dominan digunakan oleh pelaku kasus korupsi;
- Modus lainnya yang sering digunakan adalah kegiatan/proyek fiktif, penggelapan, dan *mark up*;
- Keempat modus tersebut seringkali ditemukan dalam kasus korupsi pengadaan barang/jasa dan pengelolaan anggaran pemerintah

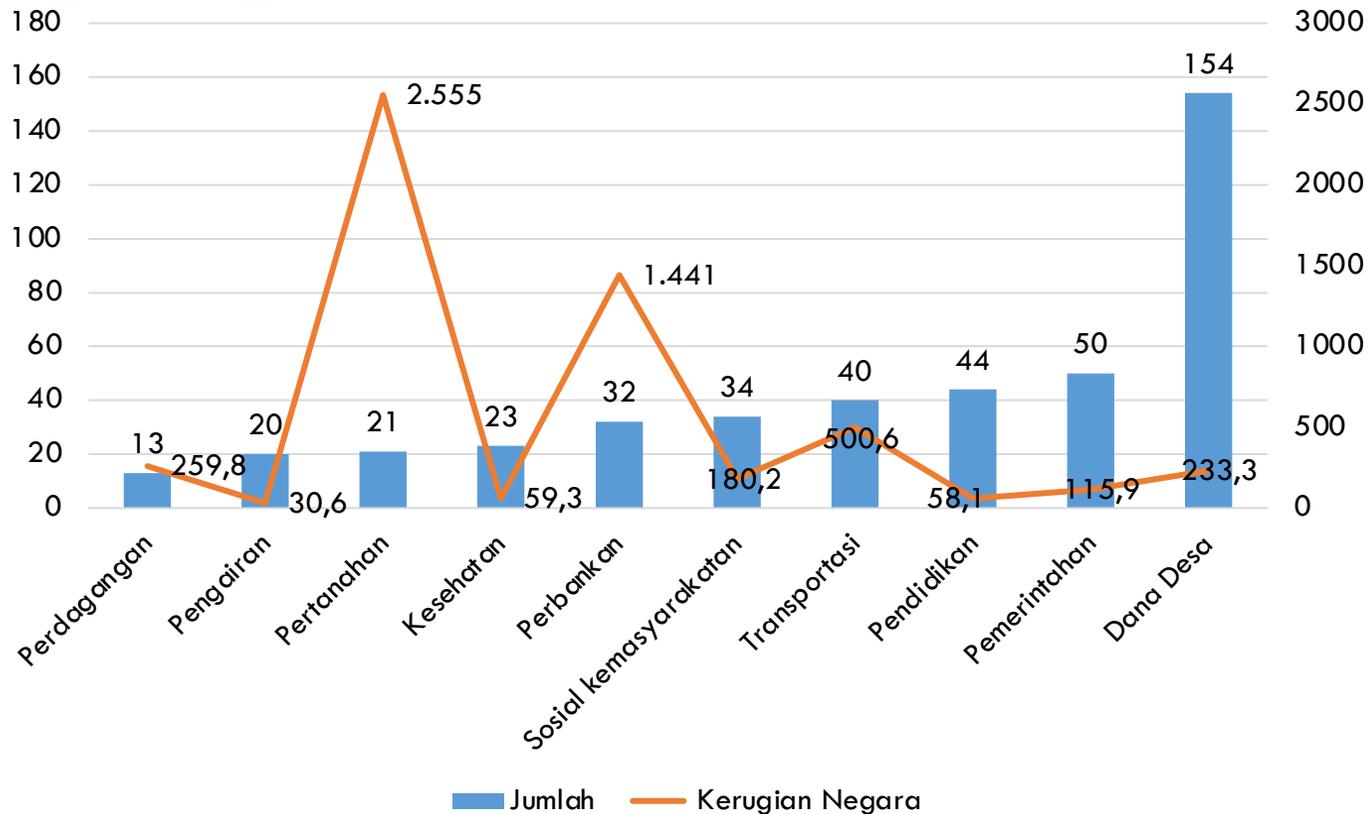


Modus Manipulasi Saham

- Sejak tahun 2020, ICW menemukan adanya modus baru tipikor, yakni manipulasi saham;
- Setelah pada tahun 2020 terdapat kasus PT. Asuransi Jiwasrya, tahun 2021 terdapat kasus PT. Asabri dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 22,78 triliun
- Dalam perkembangannya, PPATK menemukan transaksi mencurigakan menggunakan transaksi bitcoin;
- Perlu ada peningkatan kompetensi dari APH untuk menangani modus tersebut



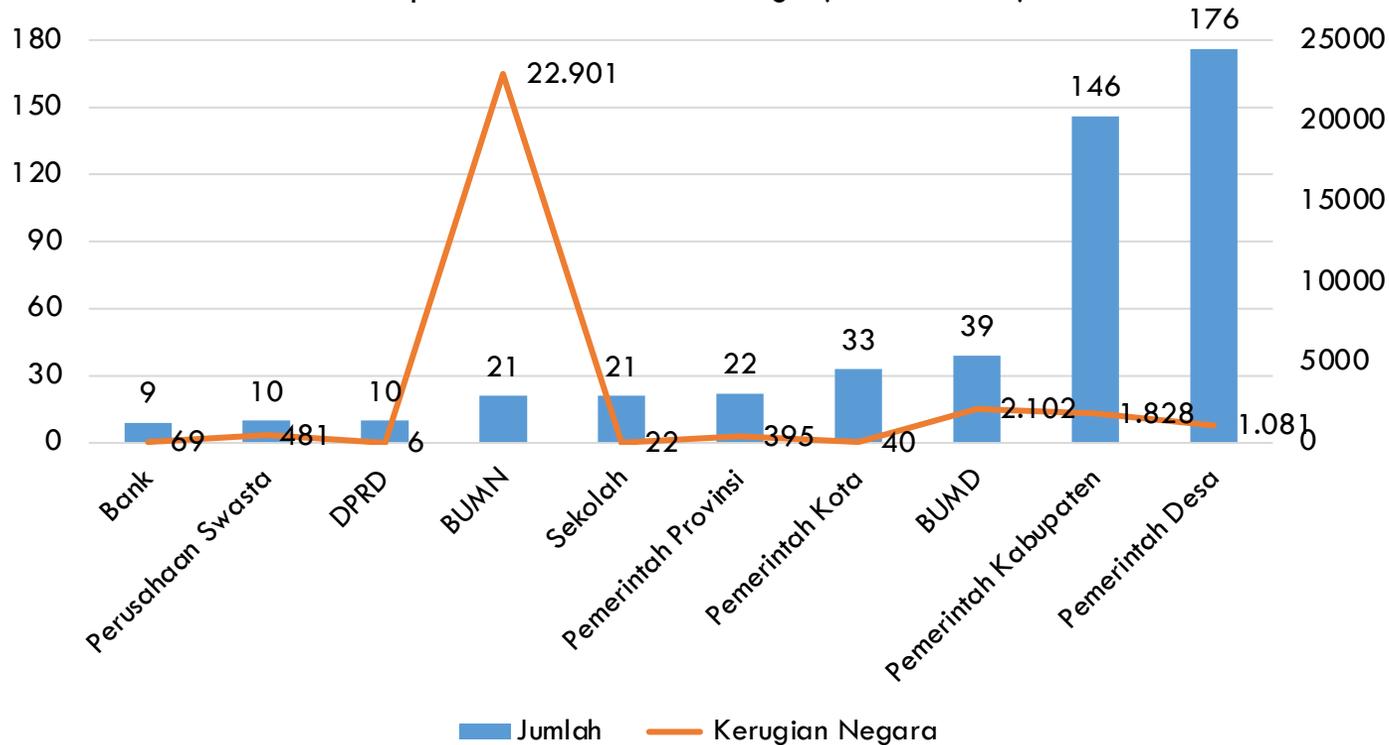
Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor Pada Tahun 2021 (Top 10)



- Pada tahun 2021, aparat penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa;
- Pengawas pada sektor anggaran desa perlu diawasi secara ketat mengingat pada tahun 2022 anggaran desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp 68 triliun
- Sektor pelayanan publik juga menjadi sektor yang paling sering terjadi korupsi, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pertanahan.
- Sementara potensi nilai kerugian negara yang paling besar ada pada sektor pertanahan.

Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Lembaga pada Tahun 2021 (Top 10)

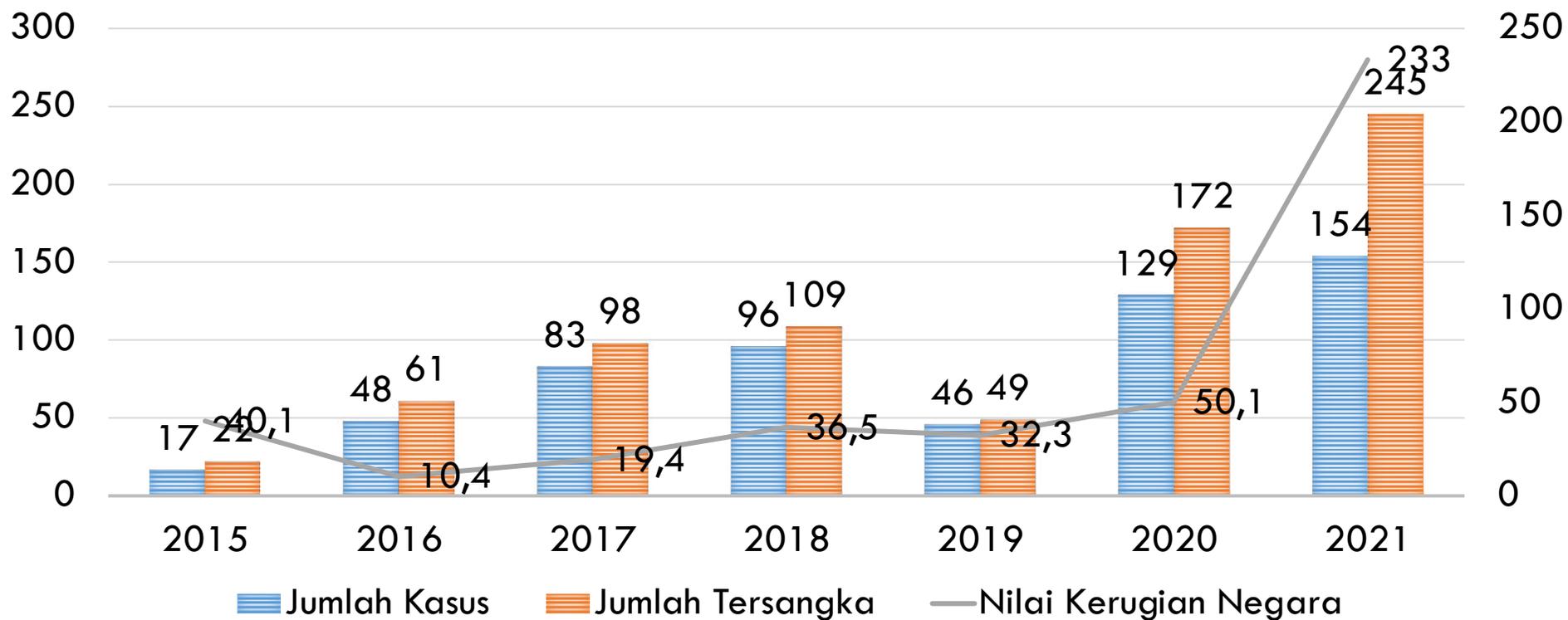
Pemetaan Korupsi Berdasarkan Lembaga (10 Terbesar) Tahun 2021



- Pada tahun 2021, penegak hukum paling banyak menangani kasus yang melibatkan pemerintahan desa
- Kasus Korupsi yang melibatkan pemerintah desa mulai muncul dan trennya terus meningkat sejak Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk desa
- Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota juga menjadi lembaga yang paling sering ditangani APH;
- Angka ini setidaknya menunjukkan bahwa sistem pemerintahan perlu melakukan reformasi birokrasi untuk mencegah korupsi

Korupsi Dana Desa

KORUPSI DANA DESA TAHUN 2015-2021



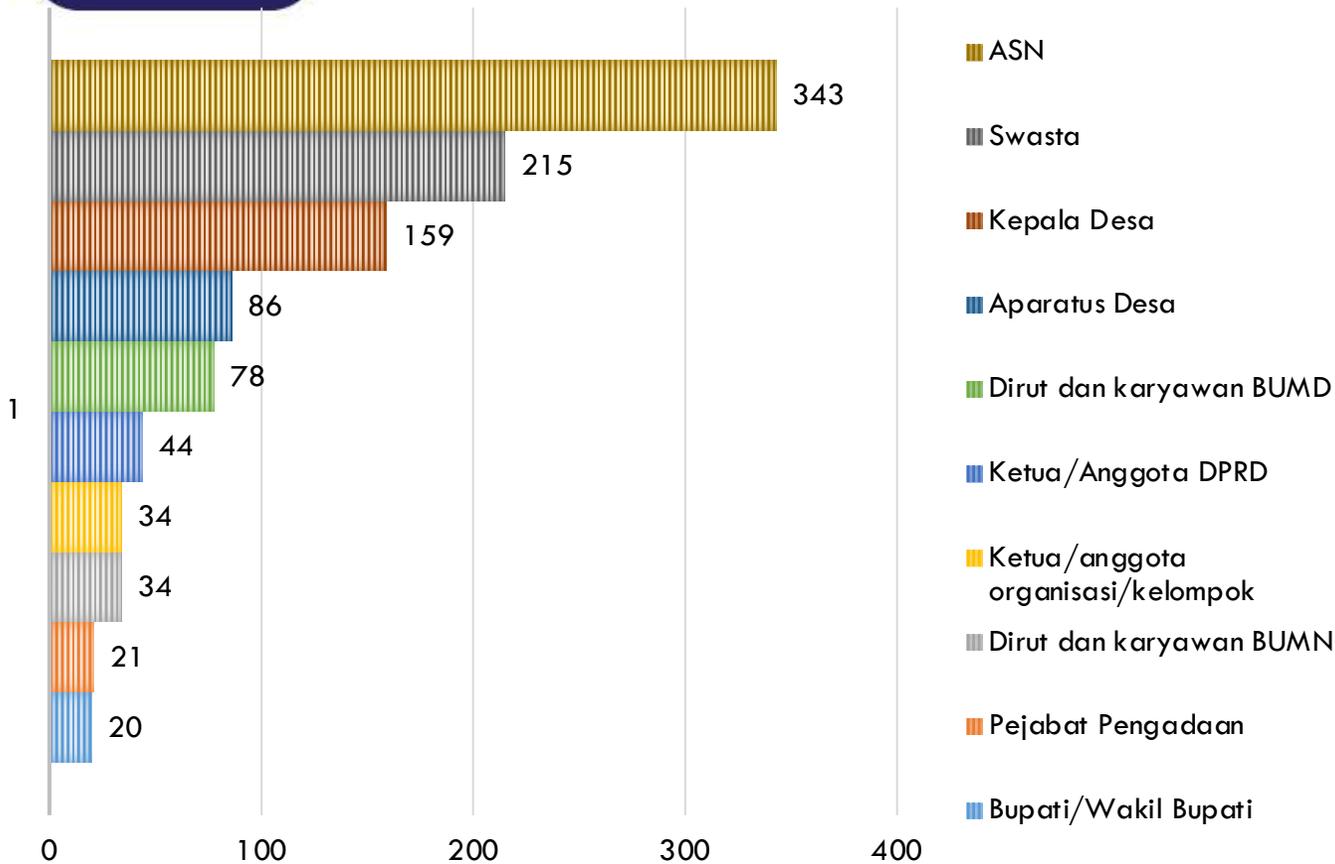


Korupsi Dana Desa

- Sejak diterbitkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, ICW mencatat ada kenaikan yang cukup konsisten terhadap kasus korupsi yang terjadi di Desa
- Pemerintah, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) perlu mengambil langkah konkrit untuk melakukan pencegahan korupsi yang lebih strategis
- Upaya Pemerintah untuk melakukan pengawasan terhadap sektor dana desa melalui Stranas PK sendiri juga patut dipertanyakan
- Salah satu fokus dalam Stranas PK sendiri adalah implementasi strategi pengawasan keuangan desa.

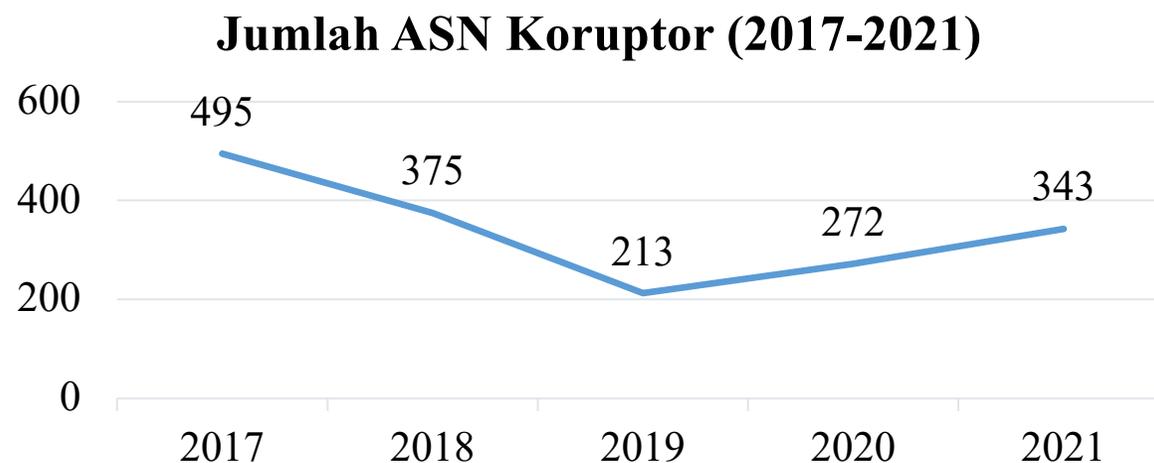


Pemetaan Kasus Korupsi Berdasarkan Aktor Tahun 2021 (Top 10)



- Aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala Desa.
- Berdasarkan hasil pantauan, kasus korupsi yang melibatkan unsur ASN dan swasta terjadi pada saat proses pengadaan barang/jasa.
- Sementara itu, Kepala Desa merupakan aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka akibat melakukan penggelapan anggaran desa.
- Selama tahun 2021, tercatat hanya ada 11 (sebelas) korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka (1 ditangani KPK dan 10 ditangani Kejaksaan)
- Terdapat 24 Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi tersangka (1 Gubernur) (3 wali kota) (20 Bupati/Wakil)

ASN Koruptor



- Agenda Reformasi Birokrasi oleh Pemerintah (PerPres 81/2010) belum memberikan dampak signifikan;
- Pemerintah perlu merumuskan kembali kebijakan dan aksi yang strategis yang dapat diterapkan ke setiap instansi pemerintah untuk menurunkan potensi terjadinya korupsi



Penindakan Kasus Penyalahgunaan Anggaran Covid-19

- Terhitung dalam rentang waktu 2020-2021, terdapat 30 kasus korupsi dengan potensi nilai kerugian negara Rp22,49 miliar dan potensi nilai suap Rp23,43 miliar
- Secara umum, korupsi terjadi di sektor anggaran Bansos Sembako, BST, dan BLT;
- Selain itu pengadaan barang dan jasa terkait alat kesehatan seperti masker, alat rapid test, vaksin, serta Bantuan Operasional untuk Pendidikan Keagamaan Islam juga banyak ditemukan
- Modus paling jamak dilakukan oleh tersangka kasus korupsi adalah penyalahgunaan anggaran dan penyunatan atau pemotongan
- Selain melibatkan pejabat di tingkat kementerian, dari 30 kasus ada 4 kasus yang melibatkan kepala daerah (Bupati)



Target Kerja dan Anggaran Tahun 2021



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus



Kasus



Rp juta/kasus

Nasional

25

217,8

40

155,1

120

138,3

Provinsi

2-47

116-1.388

1

129,8

N/A

Kab/Kota

1-75

4,1-640

1

129,8

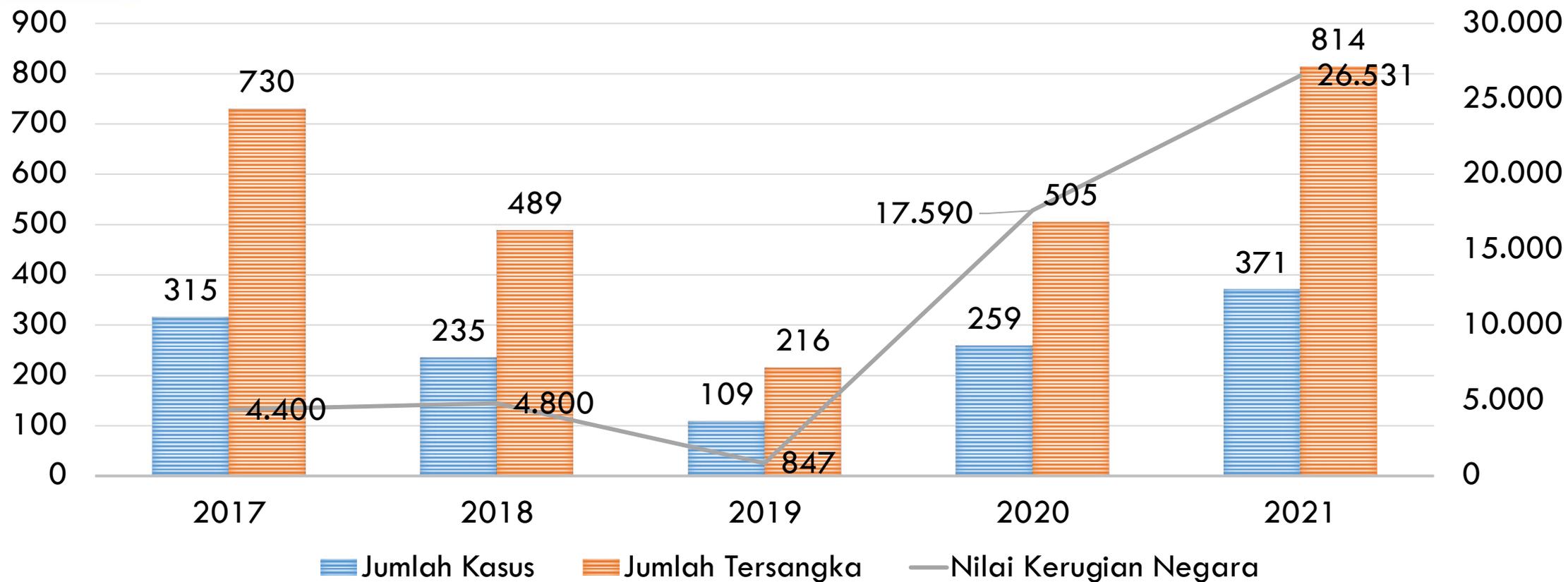


Kinerja Penegak Hukum Tahun 2021

			
	371 kasus	130 kasus	32 kasus
	814 tersangka	244 tersangka	115 tersangka
	Rp26,5 triliun	Rp2,3 triliun	Rp596 miliar



Kejaksaan





Kuantitas Penanganan Kasus

- Kejaksaan memiliki kantor sebanyak 532 kantor di seluruh Indonesia dengan target penanganan kasus selama 2021 sebanyak 571 kasus. Anggaran yang dikelola sebesar Rp75,5 miliar;
- Kejaksaan sepanjang tahun 2021 menangani sebanyak 371 kasus;
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan sekitar 53 persen atau masuk dalam kategori **B atau Baik**

Kualitas Penanganan Kasus

- Aktor yang banyak ditangani oleh Kejaksaan adalah ASN (242 tersangka), Swasta (162 tersangka) dan Kepala Desa (101 tersangka)
- Nilai kerugian negara dari kasus yang ditangani oleh Kejaksaan menjadi yang terbesar selama 2021 ketimbang instansi lainnya;
- Namun hal ini tidak dapat serta merta menjadi suatu pencapaian karena Kejaksaan harus memastikan bahwa potensi nilai kerugian sebesar Rp. 26,5 Triliun harus kembali ke kas negara.

Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Diduga terdapat sejumlah Kejaksaan yang tidak menangani kasus korupsi. Artinya, Jaksa Agung perlu melakukan evaluasi terhadap setiap Kejaksaan yang terbukti tidak bekerja.
- Dalam kinerjanya, Kejaksaan masih minim melakukan pengembangan kasus yang ditanganinya, salah satunya adalah kasus Jaksa Pinangki, Kejaksaan masih belum melakukan upaya untuk mengejar aktor lain yang terlibat dalam kasus tersebut.



Wacana Restorative Justice Kejaksaan Agung

- Kejaksaan Agung menyampaikan bahwa korupsi di bawah Rp50 juta cukup mengembalikan kerugian negara dan dilakukan pembinaan;
- Penting diketahui bahwa berdasarkan Pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak lantas menghentikan perkara.
- Sikap Kejaksaan Agung tersebut bertolak belakang dengan Kepolisian yang tidak memasukkan tindak pidana korupsi sebagai persyaratan materil untuk tindak pidana yang ditangani berdasarkan keadilan restoratif (Perkapolri 8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif)

Kejaksaan Agung Jelaskan Soal Pidana Korupsi Rp 50 Juta Tak Dihukum

Reporter: Antara

Editor: Aditya Budiman

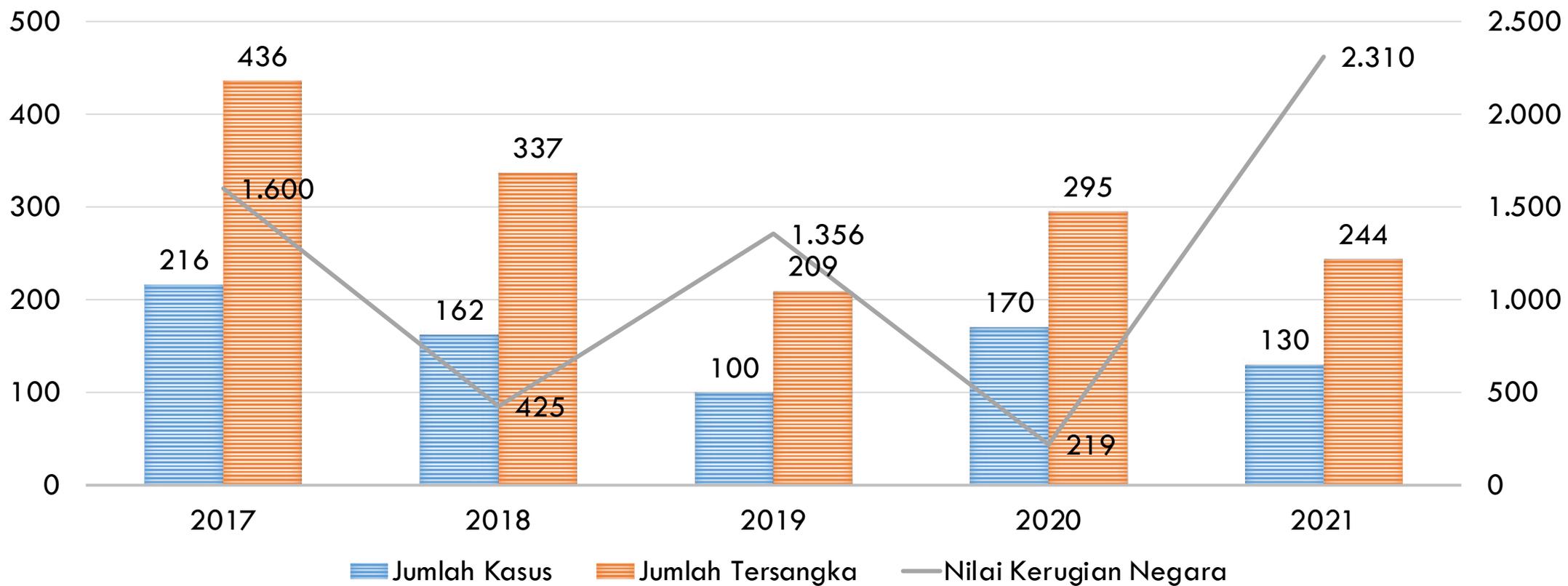
Sabtu, 29 Januari 2022 08:51 WIB

0 KOMENTAR





Kepolisian





Kuantitas Penanganan Kasus

- Penanganan kasus korupsi di Kepolisian menurun dibandingkan dengan tahun –tahun sebelumnya
- Kepolisian memiliki 517 kantor. Target penanganan kasus korupsi selama 2021 sebanyak 1.526 kasus dengan anggaran sebesar Rp290,6 miliar.
- Kepolisian selama tahun 2021 hanya dapat menangani 130 kasus. Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kepolisian sekitar 8,4 persen atau masuk dalam kategori **E atau Sangat Buruk**

Kualitas Penanganan Kasus

- Aktor yang banyak ditangani oleh Kepolisian adalah ASN (73 tersangka), Kepala Desa (57 tersangka) dan Swasta (37 tersangka);
- Pasal yang banyak digunakan Kepolisian dalam menjerat pelaku adalah pasal Kerugian Negara yakni sebanyak 119 kasus dengan potensi nilai kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun
- Janji Kapolri Listyo Sigit yang pada saat *fit and proper test* menegaskan akan memaksimalkan pemulihan aset dalam kasus korupsi.
- Selain itu, pada bulan Februari 2021 lalu, Kapolri meningkatkan kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai upaya agar lembaganya mampu mengoptimalkan *asset recovery* dalam kasus tindak pidana ekonomi
- Namun kenyataannya kepolisian hanya sebanyak 2 kali menerapkan instrument pasal pencucian uang yakni kasus korupsi Bank Jawa Tengah cabang Blora dan Jakarta serta pengembangan kasusu yang menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

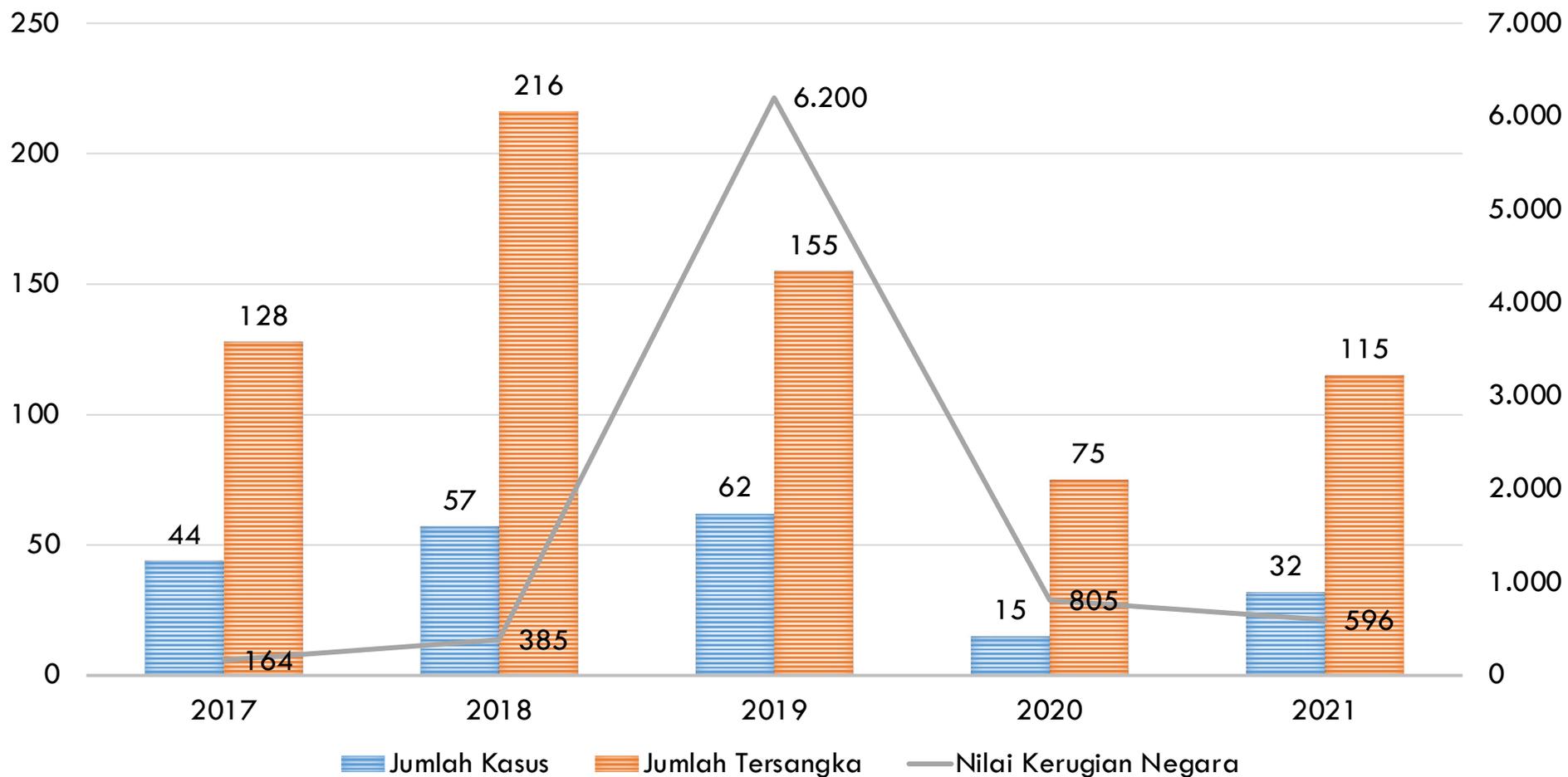
Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Dengan sumber daya yang melimpah dari segi anggaran ketimbang Kejaksaan dan KPK, kinerja Kepolisian justru lebih buruk;
- Tidak ada upaya dari Kepolisian untuk membongkar kasus pada aktor yang paling strategis.





Komisi Pemberantasan Korupsi





Kuantitas Penanganan Kasus

- KPK sejak mengalami revisi UU pada tahun 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan terhadap kasus korupsi yang ditangani, baik dari segi jumlah, tersangka, maupun nilai kerugian negara
- Persentase kinerja penindakan kasus korupsi oleh KPK hanya sekitar 26,6 persen dari target sepanjang 2021 sebanyak 120 kasus. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja KPK masuk dalam kategori **D atau Buruk**.

Kualitas Penanganan Kasus

- Secara umum, KPK telah menysasar aktor strategis, meski belum banyak, namun hal ini perlu ditingkatkan
- Berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian, KPK paling dominan menggunakan pasal suap dalam menangani perkara selama tahun 2021
- Hanya ada 1 korporasi yang KPK tetapkan sebagai tersangka



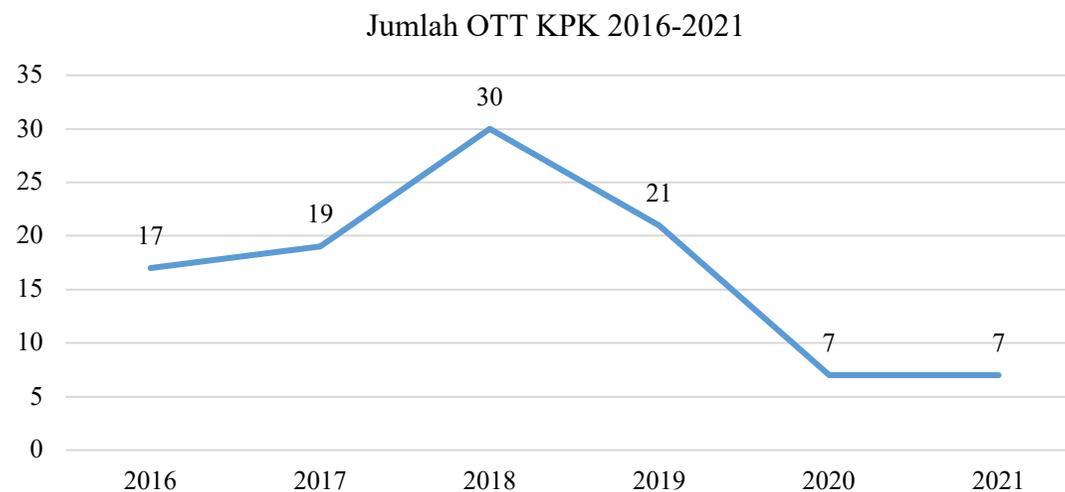
Profesionalisme Penindakan Kasus Korupsi

- Ditetapkan penyidik KPK yakni Stephanus Robin sebagai tersangka dalam kasus suap penanganan perkara di Tanjung Balai, semakin mendegradasi integritas KPK di tengah situasi politik hukum anti korupsi saat ini.
- KPK sangat pasif untuk melakukan upaya supervisi kasus korupsi yang ditangani oleh penegak hukum lain, salah satu contohnya adalah respon KPK terhadap kasus korupsi PT. Asabri yang ditangani Kejaksaan Agung
- Kewenangan supervisi sendiri diatur menjadi fungsi KPK yang tak terpisahkan berdasarkan UU 19/2019 dan hal ini diperkuat dengan adanya PerPres 102/2020 tentang supervisi pemberantasan korupsi



Implikasi Revisi UU KPK

1. Jumlah OTT sejak tahun 2020 anjlok





Implikasi Revisi UU KPK

2. Pemecatan 58 pegawai KPK melalui TWK diduga kuat menghambat perkara.

Berdasarkan pantauan ICW, dari 32 kasus yang ditangani KPK pada tahun 2021, lima kasus di antaranya ditangani oleh penyidik yang dinonaktifkan.

1. Kasus suap pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017-2018;
2. Kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon;
3. Kasus korupsi di PUPR Kota Banjar;
4. Kasus suap pajak di Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan; dan
5. Kasus dugaan suap penanganan perkara Tanjung Balai.



Implikasi Revisi UU KPK

3. Keengganan Meringkus Buron

KPK masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangkap 4 orang yang masuk dalam DPO

No	Nama	Kasus	Tahun Buron
1.	Kirana Kotama	Dugaan suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan tahun 2014	2017
2.	Izil Azhar	Dugaan penerimaan gratifikasi terkait pembangunan proyek dermaga Sabang tahun 2006-2011	2018
3.	Surya Darmadi	Dugaan suap pengadaan kapal SSV pemerintah Filipina tahun 2014- 2017	2019
4.	Harun Masiku	Dugaan suap Pengganti Antar Waktu (PAW) DPR RI	2020

Alih-alih menangkap buron, Kasatgas yang menangani kasus Harun Masiku justru turut diberhentikan melalui TWK



Kesimpulan

- Pada tahun 2021, ICW menemukan ada sebanyak 533 kasus korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum dengan 1.173 tersangka
- Potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan sebesar Rp 29,438 Triliun, potensi nilai suap sebesar Rp212 miliar, potensi nilai pungutan liar atau pemerasan sebesar Rp5,9 miliar, dan potensi nilai pencucian uang sebesar Rp 20,975 miliar;
- Dalam konteks keterbukaan informasi penanganan kasus, Kejaksaan dan Kepolisian cenderung tertutup, sedang KPK sangat informatif;
- Dilihat dari jumlah kasus diduga terdapat penegak hukum di sejumlah daerah yang tidak melakukan penindakan terhadap kasus korupsi;
- Kinerja tiap APH pada tahun 2021 ini hanya mencapai sekitar 24% dan sehingga mendapat D atau Buruk
- Penegak hukum paling banyak menangani kasus korupsi di sektor anggaran dana desa (154), Pemerintahan (50 kasus) dan Pendidikan (44 kasus);
- Korupsi di sektor anggaran dana desa jumlah terus meningkat sejak tahun 2015

Kesimpulan



- Sementara aktor yang paling banyak terlibat kasus korupsi adalah ASN (343 orang), Swasta (218 orang), dan Kepala Desa (159 orang);
- Dalam rentang waktu 2020-2021, ditemukan sebanyak 30 kasus korupsi yang terkait anggaran Covid-19 dengan modus paling dominan adalah penyalahgunaan anggaran dan pemotongan atau penyunatan;
- Kinerja Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi mendapatkan nilai B atau Baik, Kepolisian E atau sangat buruk, dan KPK D atau Buruk
- Institusi penegak hukum hanya menggunakan instrumen pencucian uang sebanyak 8 kali
- Pernyataan Kejaksaan Agung mengenai korupsi Rp50 juta tidak perlu diproses hukum patut dikritisi, sebab berdasar pasal 4 UU Tipikor, pengembalian kerugian negara tidak menghapus tindak pidana
- Dampak dari revisi UU KPK setidaknya dapat terlihat dari memburuknya kinerja KPK selama dua tahun terakhir, diantaranya, jumlah OTT yang menurun drastis, potensi bertambahnya perkara mangkrak pasca pemberhentian 58 pegawai KPK, dan minimnya fungsi supervise



Rekomendasi

- Institusi penegak hukum harus melaporkan pertanggungjawaban mengenai penggunaan anggaran untuk penyidikan kasus korupsi dan detil kasus yang masuk pada tahap penyidikan (deskripsi kasus, nama tersangka, nilai kerugian negara). Hal tersebut sejalan dengan mandat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat terhadap alokasi anggaran dana desa, sebab pada tahun 2022 anggaran dana desa mencapai Rp 68 triliun;
- Setiap Institusi Penegak Hukum perlu memprioritaskan penggunaan instrumen pencucian uang untuk mengembalikan kerugian hasil kejahatan korupsi
- Pemerintah perlu melakukan penguatan kelembagaan inspektorat untuk meminimalisir terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah daerah, hal ini dilakukan guna menguatkan agenda reformasi birokrasi



Rekomendasi

- Pemerintah dan DPR segera memprioritaskan agenda pemberantasan korupsi dengan segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Tunai atau Uang Kartal;
- Presiden dan DPR harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja institusi penegak hukum dan menjadikan kinerja dan capaian institusi penegak hukum dalam menangani perkara korupsi sebagai dasar untuk menentukan besaran alokasi anggaran

TERIMA KASIH

